



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- Bangka Pos
- Babel Pos
- Babel News
- Radar Bangka
- Rakyat Pos
- Lainnya: _____

Tanggal:

(Media Visit)

Bulan:

Thn:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	✓

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
				✓	

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
✓																								

BPK Audit Kinerja Tiga BUMD di Babel



BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Babel tidak sekadar memberikan rekomendasi usai melakukan pemeriksaan. BPK juga mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang wajib dilakukan penerima laporan hasil pemeriksaan. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi bisa berlangsung hingga 10 tahun.



FOTO BERSAMA - Kepala Kantor BPK Perwakilan Babel, Arif Agus (kelima dari kanan) berfoto bersama tim BPK dan jajaran manajemen Bangka Pos Group, Rabu (14/12).

BANGKA POS/RESHA JUHARI



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- Bangka Pos
- Babel Pos
- Babel News
- Radar Bangka
- Rakyat Pos
- Lainnya: _____

Tanggal:

(Media Visit)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	✓

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
				✓	

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
✓																								

BPK Audit Kinerja Tiga BUMD di Babel

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bangka Belitung tidak tinggal diam setelah memberikan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Lembaga yang berkantor di Komplek Perkantoran Gubernur Babel itu juga melakukan pemantauan atas rekomendasi yang sudah dikeluarkan. Tidak tanggung-tanggung, pemantauan bisa dilakukan hingga 10 tahun.

Demikian disampaikan Kepala Kantor BPK Perwakilan Babel, Arif Agus saat berkunjung ke Kantor Bangka Pos, Pangkalpinang, Rabu (14/12) siang. Arif yang didampingi Kepala Sub Auditorat, Harwinoko, Kepala Sekretariat Perwakilan, Anis Ridawati, Kasubag. Humas, Danang Puspa dan Ketua Tim Senior, Nur Romadon, disambut General Manager Bisnis Bangka Pos Grup Daryono, dan Wakil

Pemimpin Redaksi Bangka Pos Tarden Turrip.

Untuk LHP itu ada tindak lanjutnya, tidak hanya sampai pada pemberian opini saja. Tapi yang lama itu tindak lanjut dari pemeriksaan itu yaitu persoalan rekomendasi ini kita pantau terus apa ini dijalankan ini bisa 5 sampai 10 tahun," kata Arif.

Dia menjelaskan semua saran yang direkomendasikan BPK wajib untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh pejabat daerah, menurutnya pihaknya menyampaikan rekomendasi yang bersifat administratif sedangkan untuk temuan yang melanggar aturan hukum akan ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Arif mengatakan pihaknya tidak bisa menentukan apakah temuan tersebut melanggar hukum atau tidak sebelum dilakukan auditor investigatif. Biasanya kita lakukan audit investigatif dan kesimpulan audit itulah yang nantinya dibawa ke ranah aparat penegak hukum, karena untuk mengatakan itu korupsi atau tidak itu tidak

serta merta di kami, tapi bisa juga misalnya dari hasil pengembangan kasus kemudian mereka melakukan pembalasan dan menemukan fakta baru itu mereka bisa minta kami audit berapa kerugian negara," ujarnya.

Ditambahkan Arif, hasil audit BPK juga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam hal penyelidikan, melainkan hanya sebagai petunjuk dalam penyelidikan. Oleh karena itu, umumnya pihaknya melakukan audit investigatif untuk memastikan kerugian negara.

Selain melakukan audit terhadap laporan keuangan di tujuh kabupaten kota dan satu Provinsi, BPK Perwakilan Babel juga melakukan audit terkait kinerja, audit pemeriksaan perencanaan pembangunan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk tahun ini, Arif menyebut pihaknya masih melakukan pemeriksaan 7 kabupaten/kota dan provinsi, serta 3 BUMD yaitu BUMD Provinsi, Pangkalpinang, dan Bangka. (02)